



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/321/2026

TENTANG

LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA,
KLINIK PRATAMA, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM
MEDIS, LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UNIT PENGELOLA
DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta tata kelola penyelenggaraan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit, klinik utama, klinik pratama, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat, dan unit pengelola darah;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/62/2026 tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Klinik Pratama, Pusat Kesehatan Masyarakat,

Laboratorium Medis, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pengelola Darah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA, KLINIK PRATAMA, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM MEDIS, LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UNIT PENGELOLA DARAH.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Klinik Pratama, Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Medis, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pengelola Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Klinik Pratama, Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Medis, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pengelola Darah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Akreditasi memiliki kewajiban:

- a. menyiapkan sistem dan sumber daya untuk penyelenggaraan akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan pelatihan calon surveior akreditasi dengan menggunakan kurikulum dan modul pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- c. menugaskan tim surveior yang memiliki sertifikat pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan survei akreditasi yang berpedoman pada:
 - 1) standar akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2) petunjuk teknis dan instrumen survei akreditasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atau Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberlakukan tarif survei akreditasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri;

- f. tidak melakukan kecurangan (*fraud*) termasuk dalam pelaksanaan survei sampai dengan penyampaian rekomendasi penetapan status akreditasi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan survei akreditasi dan rekomendasi status akreditasi berdasarkan hasil verifikasi laporan survei akreditasi kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atau Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sesuai dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan akreditasi;
- h. menetapkan indikator mutu dan target yang harus dicapai oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi;
- i. mematuhi target indikator kinerja Lembaga serta menetapkan dan melaksanakan program kerja Lembaga untuk mencapai target indikator kinerja Lembaga, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atau Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sesuai dengan kewenangannya;
- j. terakreditasi oleh lembaga pengakreditasi lembaga penyelenggara akreditasi nasional dan/atau internasional secara berkala, paling lambat 5 (lima) tahun sejak pertama kali ditetapkan dan dibuktikan dengan dokumen telah terakreditasi;
- k. memenuhi dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait akreditasi; dan
- l. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atau Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas atas penyelenggaraan akreditasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Menteri melalui Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

KEEMPAT : Setiap Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang:
a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Penyelenggara Akreditasi;

- b. tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, tidak melaksanakan kewajiban, atau tidak kredibel;
- c. melakukan tindakan kecurangan (*fraud*); dan/atau
- d. memberikan rekomendasi status akreditasi tidak sesuai dengan penilaian mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dikenakan sanksi administratif oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atau Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sesuai dengan kewenangannya.

KELIMA : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan Lembaga Penyelenggara Akreditasi; dan/atau
- d. pencabutan atas penetapan Lembaga Penyelenggara Akreditasi,

yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Akreditasi.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/406/2020 tentang Penetapan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit; dan
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/62/2026 tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/321/2026
TENTANG
LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI
RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA, KLINIK
PRATAMA, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, LABORATORIUM MEDIS,
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN UNIT PENGELOLA
DARAH

LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA,
KLINIK PRATAMA, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, LABORATORIUM
MEDIS, LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT, DAN UNIT PENGELOLA
DARAH

- A. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
1. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
 2. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI)
 3. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP)
 4. Lembaga Akreditasi Mutu Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)
 5. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI)
 6. Badan Akreditasi Mutu Rumah Sakit (BAMUTU RS)
 7. Lembaga Akreditasi Layanan Kesehatan (LAL-KES)
 8. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Quantum Indonesia (LARSQI)
- B. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah
1. Komite Akreditasi Kesehatan Lanjutan (KAKL)
 2. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Lanjutan (LAFKESLAN)
 3. LAFKI Pelayanan Lanjutan (LAFKI PKL)
 4. Lembaga Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah (LASKESDA)

5. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Laboratorium Medis, Unit Pengelola Darah, dan Klinik Utama (LAMDAKU)
 6. Pelayanan Kesehatan Paripurna Lanjutan (PKPL)
- C. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama dan Unit Pengelola Darah
1. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Semar Bhakti Nusantara Utama (SBN Utama)
 2. Lembaga Gemilang Mutu Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah (GEMA KLU)
 3. Lembaga Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah (LABTAMA)
- D. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama dan Laboratorium Medis
1. Layanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Indonesia (LAFARSI)
- E. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama
1. Lembaga Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis, Unit Pengelola Darah Damar Husada Paripurna (LAKUMU-DHP)
 2. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Standarisasi Klinik Laboratorium dan Unit Pengelola Darah Nusantara (LASKARA)
- F. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Pratama, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
1. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI)
 2. Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI)
 3. Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP)
 4. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPAPKP)
 5. Lembaga Akreditasi Faskes Indonesia (LAFI)
 6. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas (LAFKI-PKPK)
 7. Lembaga Akreditasi Mutu Fasyankes Indonesia (LAMFI)
 8. Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAISBN)
 9. Komite Mutu Kesehatan Primer (KMKP)
 10. Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) Lipa Mitra Nusa
 11. Aski Klinik Indonesia (ASKIN)

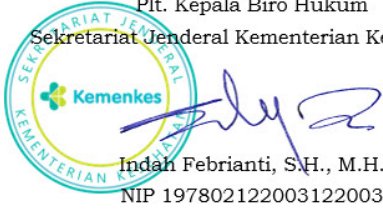
12. Lembaga Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium Indonesia (LAPKLIN)
13. Lembaga Akreditasi Prima Husada (LAPRIDA)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003